

SEGI-SEGI POLITIK-KEAMANAN ASIA TENGGARA *

Yusuf WANANDI

I. PENGANTAR

Karangan ini mencoba untuk memberikan gambaran mengenai segi-segi politik-keamanan dari Asia Tenggara dilihat dari sudut kepentingan-kepentingan Asia Tenggara. Sehubungan dengan itu, penulis sendiri sadar akan keterbatasan dan subyektivitasnya sebagai seorang Indonesia yang berbicara tentang seluruh Asia Tenggara yang masih penuh dengan berbagai macam ragam pikiran maupun perbedaan. Karena itu mungkin lebih tepat bila dikatakan bahwa apa yang akan disajikan di sini merupakan pandangan-pandangan dari negara-negara anggota ASEAN. Di antara pandangan-pandangan ini pun masih ada nuansa-nuansa yang cukup berarti, dan karena cukup mengenalnya, penulis akan mencoba pula untuk menyajikan nuansa-nuansa yang dianggap cukup menonjol dan perlu disinggung.

Mengenai aspirasi dan pandangan dari negara-negara Indocina, terutama Kamboja, hanya bisa dilakukan perkiraan-perkiraan belaka berhubung sangat sedikit yang bisa diketahui mengenai apa yang menjadi tujuan para pimpinan mereka. Karena kemenangan-kemenangan dari rejim-rejim sekarang di negara-negara Indocina itu, hampir sama sekali tertutup lagilah pintu bagi orang asing untuk mengadakan peninjauan-peninjauan yang berarti di sana, terutama di Kamboja dan di Vietnam bagian selatan. Karena itu bila dalam karangan ini disebutkan

* Karangan ini adalah terjemahan prasaran pada *Seminar Amerika-Serikat-Asia Tenggara* di Bali, 30 Mei — 1 Juni.

Asia Tenggara, yang dimaksudkan adalah terbatas pada negara-negara anggota ASEAN, kecuali bila dengan jelas disebutkan pula negara-negara Indocina dan Birma.

II. PERSOALAN-PERSOALAN DAN MASALAH-MASALAH YANG MEMPENGARUHI SITUASI POLITIK-KEAMANAN ASIA TENGGARA

1 Pertentangan Uni Soviet — RRC

Tidak bisa disangkal bahwa pertentangan Uni Soviet dengan RRC bukan saja penting untuk keseimbangan kekuatan global antara kedua "superpowers", tetapi juga sangat penting untuk nasib kawasan Asia, terutama Asia Timur dan Asia Tenggara (atau bagi Asia Pasifik dan Pasifik Barat). Karena adanya pertentangan tersebut, hasrat kedua negara ini, yang timbul karena alasan-alasan yang berlainan, untuk menambah pengaruhnya di kawasan Asia Pasifik menjadi terhambat oleh yang lain. Dan akibatnya usaha-usaha mereka untuk menanamkan pengaruh masing-masing di kawasan Asia Tenggara menjadi terbatas pula.

Uni Soviet sebagai "superpower" yang merasa dirinya harus mengimbangi AS di manapun mencoba untuk hadir secara politis di kawasan Asia dengan ide "Asian collective security arrangement", yang tampaknya ditujukan pula RRC, yaitu untuk bisa mengepung RRC dari Timur dan Selatan. Uni Soviet mengatakan bahwa ide tersebut mengikuti model Konperensi Keamanan Eropa, tetapi Konperensi Keamanan Eropa ini timbul karena perkembangan yang sama sekali berbeda dengan situasi yang terjadi di benua Asia. Karena ide tersebut tidak jelas maksudnya dan terlalu kelihatan ditujukan pada RRC, hingga kini tidak ada negara Asia yang secara terbuka mendukungnya.

Di samping usul "Asian collective security arrangement" tersebut di atas, usaha-usaha Uni Soviet untuk mengimbangi RRC sangat jelas kelihatan dalam usaha mereka untuk membantu Vietnam dan Laos. Bantuan ini diberikan kepada negara-negara Indocina agar bisa berhasil dalam pembangunannya

dengan maksud supaya mereka bisa lebih dekat pada Moskow dan bisa menjadi kawan yang ikut mengimbangi RRC di Asia Tenggara. Usaha-usaha Uni Soviet untuk membendung pengaruh RRC sangat dirasakan pula di Muangthai antara tahun 1973-1976 sewaktu Muangthai untuk kesekian kalinya mencoba menjalankan suatu demokrasi. Usaha-usaha Uni Soviet untuk mempengaruhi para mahasiswa, cendekiawan dan buruh sehingga mereka ini mau lebih dekat dengan Uni Soviet sangat terasa, terutama dijalankan melalui cara pendekatan kulturil dan ilmu pengetahuan dan secara terbatas di bidang ekonomi pula. Tetapi dapat diperkirakan bahwa kemungkinan tersebut sekarang terbatas karena pemerintah Muangthai sekarang tidak akan mengijinkan mereka melakukan kegiatan-kegiatan tersebut secara bebas seperti dahulu.

Seperti diuraikan di atas, maksud dan tujuan Uni Soviet untuk hadir di kawasan Asia Tenggara bukanlah hanya untuk mengimbangi pengaruh RRC, tetapi juga dan terutama untuk menanamkan pengaruh mereka sebagai salah satu "superpower". Maksud dan tujuan ini rupanya mau dicapai dengan cara-cara pendekatan ekonomi dan kebudayaan. Pada akhir tahun 1950-an dan awal 1960-an Uni Soviet membantu Indonesia dalam bidang persenjataan dalam rangka usaha Indonesia untuk merebut Irian Jaya dari tangan kolonialis Belanda. Bantuan tersebut berhenti di tahun 1964 karena Indonesia di bawah pengaruh Partai Komunis Indonesia mulai condong pada RRC. Pengalaman tersebut cukup mengecewakan Indonesia. Ternyata bantuan tersebut demikian mempunyai ikatan politis, sehingga setelah tahun 1965 Indonesia tidak mungkin lagi membeli "spareparts" dengan syarat-syarat yang agak lunak. Karenanya persenjataan tersebut sekarang hampir semuanya telah jadi besi tua.

Usaha-usaha Uni Soviet di bidang ekonomi kelihatannya mencakup dua macam. Yang pertama melalui pemupukan hubungan dan kerjasama ekonomi antar pemerintah seperti terlihat dalam bantuan ekonomi Uni Soviet untuk membangun bendungan di Malaysia dan bantuan untuk membangun sumber tenaga listrik di Indonesia. Dan yang kedua melalui usaha-usaha komersial seperti di bidang perkapalan, perdagangan mesin-

mesin, keuangan atau perbankan seperti yang dilakukan oleh Moscow Norodny Bank yang berkedudukan di Singapura.

Bahwa kesemua usaha-usaha itu masih sangat terbatas jumlah maupun hasilnya, mungkin sekali adalah akibat keterbatasan kemampuan ekonomi dan teknologi Uni Soviet sendiri, yang bisa cukup maju di satu bidang yakni dalam bidang persenjataan, tetapi masih mengalami kemacetan-kemacetan di bidang-bidang lain. Bahkan dalam bidang pelayanan masih banyak dialami kekurangan-kekurangan jika berhubungan secara komersial dengan mereka, seperti kekurangan "spareparts", waktu pemasangan mesin-mesin yang lama, korespondensi yang demikian lama, kurang diberikannya perhatian yang cukup dan sebagainya.

Begitu pula usaha-usaha Moscow Norodny Bank yang pada tahun-tahun pertama kelihatan demikian agresif sehingga hampir tidak memperhatikan syarat-syarat perbankan, sekarang setelah ternyata hutang-hutang yang tidak beres demikian banyak sampai meliputi beberapa ratus juta dollar, mulai diperketat. Di samping itu, rupanya pemerintah Singapura juga memperketat pengawasannya terhadap Moscow Norodny Bank karena bank ini terlalu banyak memberikan pinjaman untuk proyek-proyek di Singapura, padahal tujuan pertamanya adalah untuk "overseas or offshore loans". Di negara-negara lain seperti Indonesia dan Malaysia, cara-cara peminjaman yang demikian lunak itu juga menimbulkan kecurigaan-kecurigaan, karena adanya pengalaman-pengalaman negara-negara tersebut di masa lalu mengenai adanya usaha-usaha untuk mempengaruhi politik dalam negeri mereka melalui golongan-golongan dan tokoh-tokoh tertentu yang anti pemerintahan yang sah.

Usaha untuk mencampuri urusan politik dalam negeri seperti misalnya yang akhir-akhir ini secara menyolok terbongkar di Malaysia di mana mereka mencoba mempengaruhi beberapa tokoh nasional golongan Melayu dengan janji-janji menetralkan penduduk keturunan Cina yang, menurut mereka, dipengaruhi oleh RRC melalui MCP (Malayan Communist Party). Meskipun penahanan dan pengakuan tokoh-tokoh yang mereka pengaruhinya tersebut mempunyai aspek politik dalam negeri, tetapi tidak bisa

disangkal bahwa Uni Soviet memang mencoba mempengaruhi mereka terutama dengan alasan untuk bisa menahan pengaruh RRC terhadap penduduk keturunan Cina setempat dengan tetap mempertahankan kedudukan dan pengaruh penduduk keturunan Melayu.

Di Indonesia percobaan-percobaan semacam itu dilakukan pula untuk mempengaruhi sebagian dari pemimpin-pemimpin yang terkenal sangat chauvinistis dan ke kiri-kirian serta kelompok yang bersifat curiga terhadap pengaruh negara-negara Barat.

Mereka melakukan pendekatan kulturil, ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dengan mengundang pemimpin-pemimpin dari pelbagai kalangan untuk mengadakan peninjauan dan diskusi di Uni Soviet. Kecurigaan terhadap komunisme yang masih sangat kuat terutama setelah peristiwa percobaan kudeta PKI di tahun 1965 dan pengalaman-pengalaman pahit yang dialami setelah itu dalam bidang kerjasama ekonomi, terutama di bidang persenjataan, telah membatasi kebebasan dan ruang gerak Uni Soviet di Indonesia.

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa usaha-usaha Uni Soviet untuk menanamkan pengaruhnya di Asia Tenggara masih sangat terbatas, baik karena keterbatasan mereka berhubung letaknya secara geografis, kemampuan ekonominya, sikap a priori mereka bahwa Asia Tenggara tidak lagi utama bagi mereka, maupun karena terdapatnya keengganan dari pemimpin-pemimpin di Asia Tenggara sendiri untuk dekat dengan Uni Soviet, karena faktor-faktor ideologis dan psikologis serta karena cara-cara pendekatan mereka yang demikian keras.

Pertimbangan-pertimbangan strategis dari negara-negara Asia Tenggara tentu saja berpengaruh pula dalam soal ini, yaitu keengganan negara-negara dan pemerintahan Asia Tenggara pada umumnya untuk dipengaruhi oleh "superpower" manapun karena pandangan mereka yang mau mempertahankan politik luar negeri yang "non-aligned" dan keinginan mereka untuk membangun suatu masyarakat sesuai dengan nilai-nilai budaya dan kepribadian mereka sendiri. Kalau di satu pihak Uni Soviet

dianggap sebagai satu kekuatan besar baru yang mencoba melebarkan pengaruhnya di kawasan ini dan yang di masa yang akan datang mempunyai kemampuan global strategis untuk hadir di kawasan ini sehingga lambat laun secara strategis Uni Soviet harus dilihat sebagai suatu kekuatan yang makin lama makin dicurigai; maka di lain pihak RRC adalah suatu negara besar yang dalam sejarah Asia Tenggara dikenal sebagai negara yang selalu mencoba melebarkan pengaruhnya di kawasan ini sehingga RRC juga selalu dilihat dengan kecurigaan.

Kecurigaan terhadap RRC tersebut berbeda-beda intensitasnya di antara negara-negara yang akhir-akhir ini pernah mengalami intervensinya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Indonesia masih paling curiga terhadap RRC karena peranannya pada tahun 1965 sehingga hubungan diplomatik Indonesia dengan RRC sampai sekarang masih dibekukan dan belum dipulihkan kembali. Filipina bisa dianggap sebagai negara yang paling tidak berprasangka terhadap RRC seperti terlihat dalam tindakan-tindakan mereka dalam rangka penyelesaian administratif orang-orang Cina perantauan asing di sana, yang dalam berbagai hal malahan diserahkan di bawah kekuasaan kedutaan besar RRC seperti misalnya dalam hal administrasi perkawinan. Di samping karena pengalaman sejarah, keseganan negara-negara Asia Tenggara untuk berhubungan erat dengan RRC adalah karena kehadiran Cina perantauan di Asia Tenggara yang berjumlah antara 13-14 juta orang dan mempunyai posisi yang cukup kuat di bidang ekonomi, terutama di bidang perdagangan maupun distribusi. Dalam hal ini kemajuan-kemajuan dalam mengintegrasikan dan mengasimilasikan orang-orang Cina perantauan ini ke dalam masyarakat pribumi sedang berjalan cukup lancar, sehingga lambat laun mereka merasa sebagai bagian dari bangsa-bangsa Asia Tenggara dan karena itu mulai menyesuaikan diri dan berpartisipasi di segala bidang kehidupan di sana. Secara khusus mungkin perlu disebut usaha-usaha pemerintah dan para pemimpin Singapura untuk menciptakan suatu bangsa dan masyarakat Singapura dari suatu masyarakat yang dahulu memiliki lebih dari 80% orang-orang Cina perantauan. Usaha-usaha ini dipermudah pula dengan politik resmi pemerintah RRC untuk tidak mencampuri urusan orang-orang Cina perantauan di negara-negara Asia Tenggara dan

malahan menganjurkan mereka untuk mengintegrasikan diri, seperti terbukti dari perjanjian-perjanjian yang diadakan dengan Malaysia dan Muangthai pada pembukaan hubungan diplomatik dengan kedua negara tersebut dan dengan penghapusan Biro Cina Perantauan baru-baru ini yang dahulu terdapat dalam lembaga-lembaga tinggi RRC.¹ Yang juga memperkuat perkembangan ini ialah kenyataan bahwa beberapa puluh ribu orang Cina perantauan yang dulu kembali ke RRC tetapi karena tidak tahan hidup di sana lalu meninggalkan tanah leluhur mereka dan sekarang tinggal, terutama, di Hongkong dan Macao.

Harus diakui pula bahwa karena adanya tekanan pada RRC di Barat dan Utara oleh Uni Soviet, RRC melakukan normalisasi hubungan secara korek dengan negara-negara Asia Tenggara dan mengurangi tekanan-tekanan politiknya ke Selatan dan Timur. Hal ini terlihat misalnya dalam tindakan-tindakan kedutaan-kedutaan besar mereka di Malaysia dan Filipina yang lebih bersifat menandingi pengaruh Uni Soviet. Dan hingga kini RRC menjauhkan diri dari tindakan-tindakan yang bisa ditafsirkan sebagai usaha mencampuri urusan domestik negara-negara tersebut, seperti misalnya masalah Cina perantauan dan masalah-masalah lain. Meskipun radio RRC masih menyiarkan dukungan terhadap partai-partai komunis di Asia Tenggara, tetapi ada penurunan intensitas dalam pengungkapan solidaritas revolusioner ini. Dan dalam kenyataan dukungan senjata dan latihan-latihan juga berkurang. Begitu pula RRC paling gigih mendukung ide ASEAN dan konsep Indonesia dan Malaysia mengenai Selat Malaka, terutama untuk mengimbangi pengaruh Uni Soviet yang masih segan-segan terhadap ASEAN karena menganggap ASEAN sebagai ciptaan AS untuk menggantikan SEATO. Meskipun demikian sikap Uni Soviet tersebut semenjak KTT ASEAN tahun 1976 sudah agak melunak, karena melihat bahwa kemauan politik dari negara-negara anggota ASEAN memang tinggi dan hasil-hasilnya di bidang ekonomi mulai kelihatan.

Namun demikian, kekhawatiran negara-negara Asia Tenggara terhadap RRC masih tetap ada karena sejarah telah menun-

¹ Pada akhir 1977 ada tanda-tanda bahwa Biro itu akan dibuka kembali. Lihat Stephen Fitzgerald, "Peking's New Pull at the Purse-Strings", *Far Eastern Economic Review*, 16 Juni 1978. Redaksi.

jukkan bahwa bangsa Cina selalu menganggap Asia Tenggara sebagai daerah pengaruhnya secara geografis. Mungkin sekarang RRC masih terbatas kemampuan strategisnya, terutama angkatan udara dan angkatan lautnya, untuk mendukung ambisi tersebut; dan dewasa ini RRC masih sibuk menghadapi tekanan dari Uni Soviet di bagian Barat dan Utara perbatasannya. Namun di masa yang akan datang, kalau tekanan tersebut berkurang karena terjadinya semacam detente dengan Uni Soviet dan kalau mereka bisa lebih meningkatkan kestabilan dalam negerinya serta kalau mereka berhasil meningkatkan hasil-hasil pembangunannya, maka dalam 10-15 tahun yang akan datang potensi-potensi strategis Cina harus diperhitungkan oleh negara-negara Asia Tenggara. Karena itu pula negara-negara Asia Tenggara secara tegas menolak usul-usul dan pemikiran-pemikiran yang ada di AS yang berpendapat bahwa RRC perlu dibantu secara militer guna menghadapi Uni Soviet, karena secara strategis sistem maupun ideologinya akan tetap melawan AS. Harus diingat pula bahwa AS perlu mempertahankan keseimbangan dalam hubungan dengan Uni Soviet. Juga karena diperkirakan oleh para pendukung usul tersebut bahwa dengan bantuan itu yang katanya bersifat defensif (padahal sekarang perbedaan antara senjata-senjata defensif dan ofensif adalah sangat tipis) AS bisa mempengaruhi perkembangan dan politik luar negeri RRC. Negara-negara Asia Tenggara di lain pihak berpendapat bahwa perkembangan domestik RRC mempunyai dinamikanya sendiri dan seperti halnya dengan negara-negara Asia Tenggara sendiri kekuatan-kekuatan luar hanya berpengaruh sangat kecil. Begitu pula, pertentangan antara Uni Soviet dan RRC bersifat sedemikian mendalam sehingga sekalipun terjadi semacam detente antara keduanya, mereka berdua secara ideologis tetap akan bertentangan, karena Uni Soviet menghendaki supremasi Partai Komunis Uni Soviet seperti di tahun 1950-an dahulu, sedangkan hal ini tidak pernah akan bisa diterima lagi oleh RRC.

Itulah sebabnya negara-negara Asia Tenggara akan mengamati secara seksama cara-cara AS melanjutkan normalisasi hubungannya dengan RRC. Bagaimanapun cara AS, RRC akan mempunyai strategi dan dinamikanya sendiri yang tidak terlepas dari kepentingan-kepentingan Asia Tenggara. Di samping itu penyelesaian soal Taiwan juga akan menjadi bukti lebih lanjut

apakah AS memang mempunyai moralitas baru dalam menjalankan politik luar negerinya atau tidak seperti seringkali diutarakan oleh Presiden Carter. Dengan perkataan lain yang diharapkan oleh negara-negara Asia Tenggara ialah agar jangan sampai AS, karena pertimbangan-pertimbangan taktis yang masih diragukan kebenarannya, mengambil keputusan-keputusan yang bersifat strategis dan bisa membahayakan baik negara-negara Asia Pasifik maupun kepentingan jangka panjangnya sendiri. Mengenai Taiwan diharapkan agar AS bisa tetap mendapatkan jaminan-jaminan terbuka atau pun tertutup agar RRC tidak menyerang pulau itu secara fisik dalam rangka penyatuan kembali Cina dan agar AS tetap mempertahankan kehadiran ekonominya di Taiwan sebagai suatu jaminan bagi pemerintah dan rakyat Taiwan.

Negara-negara Asia Tenggara mengerti perlunya normalisasi hubungan AS dengan RRC terutama dalam rangka mengimbangi Uni Soviet. Namun AS perlu mempertimbangkan pula agar intensitas dan cara-cara normalisasi tidak merugikan kepentingan jangka panjang teman-teman AS di kawasan Asia Pasifik termasuk Asia Tenggara dan kepentingan AS sendiri.

Hal ini harus diperhatikan secara seksama karena negara-negara Asia Tenggara berpendapat bahwa detente antara pemerintah RRC dan Uni Soviet bisa menyebabkan berkurangnya ketegangan di perbatasan Utara dan Barat RRC, sehingga tekanan RRC bisa diarahkan kembali ke Selatan dan Timur. Kemungkinan tersebut akan muncul terutama karena dinamika masyarakat Cina dan kepemimpinan RRC sendiri, bukan karena pengaruh ataupun peranan dari luar. Karena berkurangnya ketegangan dan pertentangan antara Uni Soviet dan RRC akan tergantung pula pada apa yang terjadi di RRC sendiri setelah meninggalnya Mao, maka perkembangan di RRC tersebut adalah faktor kedua yang perlu dibicarakan dalam rangka mengamati perkembangan politik-keamanan di Asia Tenggara.

2. Perkembangan di RRC

Banyak spekulasi telah dibuat mengenai situasi RRC semen-

jak meninggalnya Chou En-lai dan Mao Tse-tung, baik mengenai perkembangan dalam negerinya maupun berkenaan dengan politik luar negerinya. Yang bisa kita usahakan untuk dibicarakan di sini ialah kecenderungan umum dari perkembangan di RRC yang dianggap akan mempengaruhi kawasan Asia Pasifik. Yang jelas dapat dinyatakan adalah bahwa perkembangan RRC di masa yang akan datang adalah belum jelas. Karena kedudukan ketua Hua Kuo-feng terutama masih tergantung dari dukungan militer, maka kedudukan ketua Hua itu tergantung apakah persatuan PLA dalam mendukung ketua Hua masih bisa bertahan atau tidak. Karena perkembangan dalam negerinya untuk masa akan datang belum jelas, maka sulit diperkirakan perkembangan politik luar negerinya. Kalau memang bisa dianggap bahwa ketua Mao dahulu secara paranoia benar-benar anti Uni Soviet dengan penolakannya dalam hal ketergantungan pada Moskow dan persepsinya akan adanya penghinaan Uni Soviet yang telah ditujukan baik pada RRC maupun terhadap diri pribadinya dan klik Chiang Ching yang mau menjalankan secara ekstrim ide-ide ketua Mao tersebut, dengan berkurangnya pengaruh mereka di RRC bisa diharapkan bahwa ide-ide pragmatis dari Chou En-lai bisa dilanjutkan oleh ketua Hua. Hal ini berarti akan dilanjutkan hubungan secara terbatas dengan AS, terutama untuk mengimbangi Uni Soviet dan juga demi pembangunan dari RRC sendiri yang memang memerlukan keahlian dan teknologi dari Barat. Tetapi justru karena pragmatisme dan realisme di bawah kepemimpinan Hua ini, mungkin pula mereka berusaha memperkecil tekanan-tekanan militer dari Uni Soviet di perbatasan Barat dan Utara dan memberikan keleluasaan lebih besar pada politik luar negerinya sehingga karenanya akan mengadakan semacam detente dengan Uni Soviet. Meskipun, seperti sudah dikatakan di atas, RRC tidak akan pernah bisa menerima posisi subordinasi seperti di masa dulu, baik karena hubungan ideologis antar partai maupun dalam hubungan antara dua kekuatan besar yang berdampingan dan berhubungan dengan kekuatan-kekuatan besar dan kecil yang lain.

Kalau pihak militer dianggap sebagai pendukung utama dari ketua Hua, maka gejala ke arah detente tersebut bisa diperkuat karena merekalah yang bisa dianggap paling sadar akan rendahnya kekuatan militer RRC dibandingkan dengan Uni Soviet.

Kesemuanya baru akan mendapat bentuk yang lebih pasti kalau persoalan perebutan kekuasaan di RRC sudah lebih terang hasilnya. Yang masih patut diragukan adalah seberapa besar kadar persatuan di antara para pimpinan PLA dan sampai berapa lama peranan utama PLA tersebut akan dapat berlangsung terus seperti pernah dialami di jaman Lin Piao. Dan lagi, bagaimana sikap para perwira eselon kedua dari PLA yang sekarang berusia sekitar 50-55 tahun dan, terutama, hanya mendapat pendidikan dalam pemikiran-pemikiran ketua Mao saja dan tanpa pengalaman dalam hubungan internasional.

Soal kedua yang secara strategis penting pula diamati adalah soal pembangunan ekonomi di RRC yang untuk tujuan politik dan ideologis telah diabaikan oleh ketua Mao. Kalau memang kepemimpinan ketua Hua masih bisa bertahan dan pemerintahan dapat dijalankannya secara pragmatis, maka bisa diharapkan bahwa kejutan-kejutan ideologis seperti "Great Leap Forward" dan "Cultural Revolution" dari ketua Mao, yang menghambat pembangunan ekonomi secara teratur, akan dihindari. Karena itu bisa diharapkan bahwa pembangunan tersebut akan bisa menghasilkan hasil-hasil yang cukup spektakuler dalam 10-15 tahun yang akan datang. Bila hal ini terjadi, RRC akan makin membutuhkan teknologi dari Barat, dan dengan sendirinya tekanan untuk mempererat hubungan dengan negara-negara Barat termasuk AS akan terus dirasakan. Namun demikian strategi pembangunan RRC yang mendasarkan diri pada strategi berdikari akan tetap dibatasi untuk hal-hal yang benar-benar vital untuk mereka.

Di samping itu, tekanan dari pihak militer untuk lebih mementingkan pembangunan kekuatan strategis PLA akan meningkat pula sehingga bisa pula menjadi sumber kompetisi yang cukup tinggi untuk mempergunakan sumber-sumber produksi seperti di masa lampau. Karena kedudukan pihak militer itu sekarang ini lebih kuat, maka diduga perhatian untuk industri pertahanan akan meningkat. Karenanya potensi RRC di masa yang akan datang di bidang kekuatan strategis militer tidak bisa diabaikan, terutama dengan melihat kemungkinan bahwa potensi ini mungkin ditujukan pada sasaran-sasaran regional di Asia Pasifik termasuk Asia Tenggara.

Berbicara tentang perkembangan dan pembangunan RRC ini, beberapa tahun terakhir ini timbul berbagai pendapat dan ide di kalangan cendekiawan Barat maupun dari Asia Tenggara bahwa model pembangunan di RRC adalah model yang paling ideal untuk negara-negara sedang berkembang dalam rangka berdikari, keadilan sosial dan penyerapan tenaga kerja secara penuh. Ide dan pendapat semacam ini, menurut hemat kami, adalah sangat naif; tidak memperhatikan secara keseluruhan segi-segi pembangunan di RRC dan sejarah apa sebabnya model RRC itu bisa timbul dan dijalankan di sana.

Pertama-tama setiap usaha pembangunan dari suatu negara dan bangsa adalah unik dan tidak dapat begitu saja ditiru oleh negara dan bangsa lain. Perbedaan sejarah, nilai-nilai budaya, sifat, ideal bangsa dan negara itu, maupun sistem pemerintahan yang dianutnya harus dipertimbangkan. Begitu pula halnya dengan apa yang dinamakan model RRC yang hanya bisa terjadi mengingat sejarah Cina sepanjang 75 tahun yang terakhir. Selain itu, apa yang dinamakan model RRC tidak pernah bisa diuraikan atau ditunjukkan secara konkrit. Yang telah diuraikan atau ditunjukkan hanyalah beberapa segi yang ideal saja; sedangkan korban-korban dan disiplin bangsa yang harus diperlakukan untuk mencapainya demikian tingginya sehingga pelaksanaannya hanya bisa dicapai dengan suatu rejim yang sangat totaliter yang sama sekali mengabaikan nilai-nilai budaya dan perikemanusiaan yang juga penting sekali untuk dicapai di samping kemajuan-kemajuan yang berarti dalam bidang ekonomi tertentu. Malahan dalam bulan-bulan terakhir ini pimpinan RRC sendiri sudah mulai memberikan kritik-kritik yang pedas karena pembangunan ekonomi di sana sudah demikian lambat apabila dibandingkan dengan Jepang yang dianggap tidak mempunyai bahan-bahan mentah dan hampir sepenuhnya hancur karena Perang Dunia II.

Karena itu, yang bisa dipelajari dan mungkin diikuti hanyalah beberapa segi dari pembangunan mereka seperti pembangunan desa, kesehatan rakyat, keluarga berencana, penyerapan tenaga kerja untuk proyek-proyek padat karya. Hal ini dikemukakan di sini, karena kalau tidak maka para pemimpin di Asia Tenggara bisa didesak baik dari luar maupun dari dalam untuk

mengubah sistem pembangunan ekonomi mereka yang pada umumnya bersifat terbuka dan merupakan suatu ekonomi campuran antara kepentingan sektor publik dengan sektor swasta.

Jadi yang akan turut menentukan masa depan Asia Tenggara dari perkembangan-perkembangan intern RRC adalah permasalahan apakah dari perebutan kekuasaan domestik yang sekarang sedang berlangsung akan dilahirkan suatu pemerintah yang stabil atau tidak; apakah pemerintah ini dalam politik luar negerinya akan bersifat pragmatis atau tidak; dan apakah pemerintah tersebut dapat melanjutkan pembangunan ekonomi RRC secara terus-menerus atau tidak. Kalau kesemuanya itu dapat dicapai, maka untuk sementara Asia Tenggara dapat terhindar dari goncangan-goncangan besar yang disebabkan oleh perkembangan intern RRC. Meskipun untuk jangka panjang masih akan tetap menjadi suatu tanda tanya besar apakah tujuan revolusioner RRC untuk menjadikan Asia Tenggara sebagai daerah pengaruh mereka yang aman akan ditinggalkan, terutama kalau kekuatan strategisnya termasuk angkatan laut dan angkatan udaranya berada pada suatu tingkatan yang lebih tinggi dari sekarang. Hal ini tidak hanya berlaku untuk Asia Tenggara saja tetapi juga untuk Asia Timur, di mana segera akan timbul kompetisi yang akan meningkat antara RRC dan Jepang, yang karena alasan-alasan strategis maupun ekonomis juga beranggapan bahwa Asia Tenggara vital pula baginya.

3. Peranan Jepang di Asia Tenggara

Di atas telah dikatakan bahwa Jepang menganggap Asia Tenggara ini vital; pertama karena 80% dari kebutuhan energi dan lebih dari 60% dari kebutuhan bahan mentah Jepang diangkut melalui Asia Tenggara; kedua, karena Asia Tenggara penting pula sebagai pasaran, sumber bahan-bahan mentah, sumber bahan pangan, dan daerah investasi bagi Jepang. Karena itu mempertahankan suatu Asia Tenggara yang bersahabat dengan Jepang adalah tujuan penting dalam politik luar negerinya, terutama dengan negara-negara anggota ASEAN yang mempunyai ideologi yang non-komunis, bersistem ekonomi yang

terbuka dan mempunyai kemauan politik untuk meningkatkan hubungan dan kerjasama dengan Jepang.

Di lain pihak Jepang vital pula untuk negara-negara Asia Tenggara, terutama di antara negara-negara anggota ASEAN, karena merupakan partner dagang yang terpenting dan sebagai sumber modal maupun teknologi yang terbesar bagi pembangunan ekonomi mereka.

Kesadaran akan pentingnya masing-masing (Jepang dan negara-negara anggota ASEAN) untuk pihak yang lain akhir-akhir ini kelihatan dalam rangka ASEAN di mana negara-negara anggota ASEAN banyak mengharapkan agar Jepang meningkatkan perannya dan kerjasamanya baik secara internasional, maupun secara intra-regional. Karena itu pula PM Fukuda bersama-sama dengan PM Fraser dari Australia dan PM Muldoon dari New Zealand telah diundang untuk bertemu dengan Kepala-kepala Negara dan Pemerintahan negara-negara anggota ASEAN setelah KTT II ASEAN di bulan Agustus 1977 di Kuala Lumpur. Daya tarik timbal-balik antara Jepang dan Asia Tenggara memang wajar kalau dilihat letak geografis kedua pihak yang saling berdekatan, adanya kemungkinan kedua pihak untuk saling melengkapi dalam kerjasama ekonomi dan adanya kemauan politik di kedua belah pihak, yang sedikit banyak disebabkan oleh karena adanya kesamaan dan kemiripan ide-ide politik dan ekonomi kedua pihak meski secara terbatas. Namun demikian hal ini tidak berarti bahwa semuanya berjalan lancar dalam hubungan kedua belah pihak. Ini dapat dilihat misalnya dalam demonstrasi anti-Tanaka di Asia Tenggara pada tahun 1974 terutama di Muangthai dan Indonesia. Kejadian-kejadian itu memang mempunyai alasan-alasan dan faktor-faktor politik domestik, tetapi untuk sebagian juga disebabkan karena belum lancarnya hubungan Jepang dengan Asia Tenggara itu. Sebab utamanya, menurut hemat kami, adalah perbedaan nilai-nilai kulturil antara Jepang dan negara-negara Asia Tenggara pada umumnya. Di satu pihak Jepang merupakan suatu bangsa insuler, karenanya bersifat tertutup dan mementingkan sekali kesatuan serta solidaritas antar kelompok serta terbiasa bekerja keras dan sungguh-sungguh. Kalau ada suatu sasaran tertentu yang menjadi keputusan bersama, segala upaya kelompok ditu-

jukan pada sasaran tersebut; dan sasaran mereka adalah perluasan perdagangan dan investasi di Asia Tenggara yang tetap berpegangan pada kepentingan induknya di Tokyo.

Di lain pihak orang-orang Asia Tenggara lebih terbuka, perasa dan santai sifatnya. Untuk beberapa negara Asia Tenggara, pengalaman dalam bidang wiraswasta adalah suatu hal yang baru dan masih lemah, dan karenanya sering berada di bawah dominasi dari partner Jepang. Selain itu usaha-usaha kedua belah pihak untuk lebih mengenal sifat dan watak masing-masing bangsa masih sangat minim. Pihak Jepang kurang memperhatikan peranan politik apa yang mau dijalankannya di Asia Tenggara, sedangkan kegiatan-kegiatan di bidang kebudayaan yang sebenarnya justru bisa mengimbangi peranan mereka di bidang ekonomi masih sangat kecil. Di lain pihak sifat nasionalisme negara-negara Asia Tenggara cukup tinggi dan sekali-sekali timbul tanpa disadari, terutama di negara-negara yang sangat merasakan akibat-akibat pendudukan Jepang selama Perang Dunia II. Untunglah pimpinan-pimpinan di kedua pihak melihat kekurangan-kekurangan yang ada dan, terutama di tingkat pemerintahan, kesadaran akan pentingnya kerjasama untuk kedua belah pihak sudah menjadi tindakan-tindakan kebijaksanaan. Di antara pimpinan sektor swasta Jepang kesadaran ini lebih lambat tumbuhnya karena sistem mereka amat erat hubungannya dengan latar belakang kebudayaannya yang masih konservatif. Tetapi tanda-tanda kemajuan telah mulai tampak dan hal ini sangat menggembirakan. Di lain pihak, negara-negara Asia Tenggara, terutama setelah resesi ekonomi dunia dan jatuhnya Indocina ke tangan rejim-rejim komunis, juga lebih sadar akan pentingnya pembangunan ekonomi mereka dan peranan penting yang bisa dijalankan oleh Jepang dalam bidang itu. Hanya saja, meskipun ada kemauan di pihak Jepang untuk meningkatkan kerjasama ekonomi tersebut, kelihatannya mereka masih ragu-ragu untuk berbuat. Karena keadaan ekonomi dan politik dalam negerinya masih tidak menentu, mereka tidak bisa memberikan komitmen-komitmen yang pasti. Mereka juga khawatir kalau terlalu besarnya kehadiran ekonomi mereka di satu kawasan bisa menjadi hambatan politis dan psikologis bagi mereka maupun bagi negara-negara kawasan itu sendiri, seperti Asia Tenggara misalnya. Maka itu, kalau negara-negara Asia

Tenggara bisa lebih mempersiapkan diri masing-masing, termasuk mempersiapkan sektor swasta mereka agar lebih mampu mengimbangi secara sehat partner Jepang, dan kerjasama dalam rangka ASEAN di antara mereka bisa lebih dipercepat pula secara konkrit dan riil, kekhawatiran pihak Jepang tersebut akan bisa jauh berkurang. Di samping itu, faktor-faktor ekstern seperti kehadiran AS dan MEE di Asia Tenggara serta kerjasama keduanya dengan Asia Tenggara dapat pula menjadi faktor yang menghilangkan keragu-raguan Jepang untuk benar-benar membantu pembangunan di Asia Tenggara. Dengan kehadiran AS dan MEE di Asia Tenggara, akan terdapat keseimbangan dan karenanya kehadiran Jepang tidak akan menyolok lagi. Kerjasama yang demikian akan sangat berguna untuk semua pihak, bukan saja bagi negara-negara Asia Tenggara sendiri, tetapi juga untuk negara-negara Eropa Barat yang tergabung dalam MEE, untuk AS dan tentunya bagi Jepang sendiri.

Di atas telah disinggung peranan politik yang perlu dimainkan oleh Jepang khususnya di kawasan Asia Pasifik dan bahwa hingga kini memang tidak jelas peranan politik apa yang akan dimainkan oleh Jepang di kawasan itu. Rupanya hal ini menjadi pokok pembicaraan sewaktu PM Fukuda bertemu dengan Presiden Carter bulan Maret yang lalu (1977) di Washington DC. Yang terang bisa dijalankan oleh Jepang adalah peranan ekonomi, baik melalui bantuan-bantuan pemerintah maupun melalui sektor swastanya yang masih bisa lebih ditingkatkan lagi demi kemajuan dan perkembangan Asia Pasifik. Peranan politik yang dapat dijalankan adalah agar pihak Jepang meninggalkan kebiasaannya mengekor pada politik AS di segala bidang sampai bisa mempunyai pandangan-pandangan tersendiri, terutama dalam membela kepentingan-kepentingan negara-negara Asia yang lain dalam forum-forum internasional seperti di PBB, di badan-badan internasional seperti bank-bank internasional, UNCTAD, CIEC, GATT dan lain-lain. Selain itu Jepang dapat pula melakukan peranan dan mengambil inisiatif untuk memupuk suatu kerjasama regional yang baik di kawasan Asia Pasifik dan kawasan Pasifik pada umumnya. Dapatlah dimengerti kalau Jepang masih sangat segan untuk memegang peranan di bidang keamanan karena opini publik di Jepang sendiri maupun di negara-negara Asia Pasifik pada umumnya masih dilekati oleh

pengalaman-pengalaman mereka selama Perang Dunia II dan demikian pula opini publik di RRC dan Uni Soviet. Apalagi dipegangnya peranan di bidang keamanan tersebut dengan sendirinya akan membatasi kemampuan Jepang untuk berperan di bidang ekonomi. Di lain pihak harus diakui bahwa di antara generasi muda negara-negara anggota ASEAN peranan Jepang di bidang keamanan tidak lagi ditolak begitu saja karena mereka pada umumnya tidak terkena pengalaman-pengalaman Perang Dunia II dan lebih pragmatis daripada generasi yang lebih tua yang bersifat ideologis terhadap segala sesuatu yang berbau "kolonialisme" atau "imperialisme". Karena itu hendaknya AS jangan cepat-cepat membebaskan peranan di bidang keamanan pada Jepang, berhubung Jepang sendiri masih mengkhawatirkan peranan semacam itu. Dalam rangka ini Jepang dan negara-negara lain di Asia Pasifik menilai penting politik AS terhadap Korea Selatan. Yang mungkin perlu diperhatikan oleh AS adalah psikologi dari bangsa-bangsa dan negara-negara Asia Pasifik, terutama psikologi bangsa Korea Selatan sendiri dan bangsa Jepang, sehubungan dengan rencana penarikan mundur angkatan darat AS dari Korea Selatan. Unsur ini adalah salah satu faktor yang paling cepat meruntuhkan moral tentara Vietnam Selatan dahulu. Dan hal yang semacam itu hendaknya jangan terulang lagi di Korea Selatan. Karena itu rencana Presiden Carter untuk melaksanakan penarikan mundur pasukan AS hendaknya hanya dilaksanakan dengan konsultasi sepenuhnya dengan pemerintah Korea Selatan dan juga dengan pemerintah Jepang, karena ini semua merupakan jaminan yang terbaik dalam rangka memperhatikan faktor psikologis tersebut.

Diakui adanya tekanan domestik di AS untuk penarikan angkatan darat AS itu, meskipun suasana di Kongres menurut pemungutan suara pada tanggal 25 April 1977 masih menganggap perlu dipertahankannya kehadiran angkatan darat AS di Korea Selatan. Tetapi meskipun demikian, hendaknya adanya alasan domestik AS saja jangan menjadi satu-satunya ukuran bagi penarikan mundur angkatan darat AS itu. Bagi Asia Tenggara, penarikan mundur angkatan darat AS dari Korea Selatan dapat dimengerti, asal saja kepentingan Korea Selatan dan Jepang diperhatikan secukupnya. Kalau saja Jepang merasa terancam baik karena sikap Korea Utara maupun karena ikut

berperannya kekuatan-kekuatan besar lain seperti RRC dan Uni Soviet, hingga mereka merasa perlu mempersenjatai diri secara jauh lebih berat; maka segala daya upaya untuk mempertahankan peranan Jepang terutama di bidang ekonomi dan politik akan menjadi sia-sia, dan bahkan akan bertambah lagi satu faktor ketidak-stabilan yang baru di kawasan Asia Pasifik. Pengaruh ketidak-stabilan seperti itu bukan saja dirasakan oleh negara-negara Asia Tenggara dan oleh RRC serta Uni Soviet, tetapi pada akhirnya juga akan dirasakan oleh AS sendiri. Karena itu, konsultasi yang terus menerus dan keterbukaan dengan teman-teman lain untuk menyelesaikan soal yang cukup pelik ini merupakan cara yang terbaik untuk dapat menyelesaikannya.

4. Masa depan Amerika Serikat di Asia Tenggara

Kalau dahulu AS terlalu mementingkan Asia Tenggara hingga sampai demikian jauh membela negara-negara Indocina yang bukan komunis, maka sekarang kelihatan ada kecenderungan dalam opini masyarakat AS untuk melupakan saja Asia Tenggara. Hal ini tentu saja tidak terjadi di dalam pemerintahan AS atau di antara para ahli dan para spesialis tentang Asia Tenggara, tetapi perhatian masyarakat AS yang dulu memang berlebih-lebihan ditujukan kepada Asia Tenggara sekarang telah jauh berkurang. Berkurangnya perhatian ini terlihat dalam jumlah mahasiswa yang mendaftarkan diri untuk studi tentang Asia Tenggara di universitas-universitas dan dalam makin berkurang serta makin jarangnyanya berita-berita tentang Asia Tenggara yang dimuat dalam koran dan diberitakan oleh televisi. Hal tersebut memang wajar kalau dianggap sebagai suatu reaksi terhadap "over-commitment" yang dilakukan oleh masyarakat AS di masa dahulu. Yang sekarang dapat diharapkan adalah agar masyarakat AS dapat segera melupakan "trauma" Vietnam yang memang merupakan suatu luka yang demikian dalam di tubuh bangsa AS, sehingga dalam masa yang akan datang perhatian yang wajar dapat diberikan kembali pada Asia Tenggara.

Rupanya dengan akan diadakan normalisasi hubungan antara AS dengan Vietnam, luka-luka tersebut sudah mulai sembuh, dan Vietnam bukan lagi menjadi faktor penghambat bagi AS untuk mulai memikirkan kembali hubungannya dengan Asia Tenggara. Harus diakui bahwa Asia Tenggara memang tidak vital untuk AS, namun tentu saja kehadiran AS yang pernah ada di suatu daerah tidak bisa ditinggalkan begitu saja tanpa akibat-akibat untuk kawan-kawannya yang ada di daerah itu maupun untuk AS sendiri di waktu mendatang. Di samping itu Asia Tenggara bukan tidak penting bagi AS sendiri. Jumlah penduduknya, bahan-bahan mentah yang ada, potensinya sebagai sumber bahan pangan untuk Asia di masa yang akan datang, letaknya yang cukup strategis antara dua benua dan dua samudera, sistem ekonominya dan ideologinya yang mempunyai beberapa kesamaan dengan AS, dan peranannya sebagai suatu kerjasama regional yang bisa membantu menciptakan suatu tata kehidupan ekonomi dan politik yang baru dalam rangka hubungan internasional yang akan datang, semuanya ini menunjukkan betapa pentingnya Asia Tenggara.

Lagi pula Asia Tenggara adalah vital bagi Jepang, karena merupakan lalu-lintas atau jalur logistiknya yang utama di samping faktor-faktor ekonomi lainnya. Karena itu pula, Asia Tenggara akan diperhitungkan oleh AS.

Ketidak-pastian dirasakan oleh negara-negara Asia Tenggara sehubungan dengan maksud dan partisipasi AS di Asia Tenggara untuk masa mendatang. Meskipun ada pernyataan-pernyataan dari pemimpin-pemimpin AS bahwa mereka akan tetap hadir di Asia Tenggara, hingga kini tidak atau belum ada suatu rumusan yang jelas tentang bagaimana dan dalam bentuk apa peranan tersebut akan dijalankannya.

Beberapa pertanyaan yang timbul dalam rangka ini ialah :

- Apakah kehadiran AS dalam bidang keamanan akan dipertahankan di Asia Tenggara demi keseimbangan kekuatan-kekuatan besar lainnya ?
- Apakah kehadiran tersebut terutama hanya meliputi kekuatan laut dan udara ataukah juga kekuatan darat ?

- Apakah karena perbedaan di atas akan ada perbedaan perlakuan antara kontinen Asia Tenggara dan kepulauan Asia Tenggara ?
- Apakah karena itu pula pangkalan laut di Subic Bay memang masih vital ? Apakah artinya pangkalan udara Clark Field dalam rangka itu ?
- Di samping kehadiran AS di bidang keamanan, maka apa yang akan dibuat oleh AS untuk membantu kawan-kawannya di Asia Tenggara, hingga pada suatu waktu di masa yang akan datang mereka bisa mempertahankan diri mereka sendiri ?
- Apakah di samping kehadiran di bidang keamanan tersebut ada perhatian pula dari AS untuk hadir secara ekonomis, dan apakah kehadiran secara ekonomis ini akan bertambah penting ?
- Apakah kehadiran secara ekonomis yang bisa berbentuk bantuan atau pinjaman antar pemerintah, pinjaman swasta, perdagangan, investasi, dan lain-lain usaha akan diatur bersama dengan kehadiran secara ekonomi dari Jepang atautkah tidak ?
- Apakah artinya normalisasi hubungan AS dengan Vietnam bagi Asia Tenggara? Apakah akan merupakan unsur kestabilan atautkah hal ini tidak tergantung pada seberapa jauh intensitas hubungan tersebut.
- Bagaimana hubungan AS dengan ASEAN di masa yang akan datang ?
- Apakah soal "human rights" yang menjadi moralitas politik luar negeri AS akan menimbulkan kesulitan-kesulitan atau tidak di masa yang akan datang dalam rangka hubungan dengan negara-negara Asia Tenggara ?
- Apakah yang harus diperbuat oleh kedua belah pihak terhadap "press coverage" yang cukup negatif terhadap Asia Tenggara, karena hal tersebut justru akan membawa hubungan yang kurang baik di masa yang akan datang karena publik opini AS akan dipengaruhi olehnya secara negatif, padahal reaksi dari pemerintah-pemerintah Asia Tenggara pada umumnya negatif sekali ?
- Apakah hubungan kebudayaan, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, akan terus dijalankan di masa yang akan datang, dan apa bentuk-bentuknya di masa

yang akan datang agar benar-benar bermanfaat bagi negara-negara Asia Tenggara ?

Meskipun hubungan AS dengan Asia Tenggara akan dibahas secara tersendiri, pada tempatnyalah diuraikan di sini secara singkat segi-segi politik-keamanan dari hubungan tersebut dilihat dari perspektif Asia Tenggara. Menurut hemat kami, AS akan tetap mempertahankan kehadirannya di bidang keamanan di Asia Tenggara, meskipun masih dalam perdebatan di AS sendiri berapa besar kehadiran yang diperlukan. Kehadiran tersebut akan merupakan bagian dari kehadiran AS di seluruh Pasifik Barat atau Asia Pasifik. Dan yang jadi perdebatan adalah "deployment" apa saja yang diperlukan di seluruh Asia Pasifik tersebut. Dalam hal ini, timbul kesulitan karena, kecuali di jazirah Korea, tidak terdapat skenario yang pasti tentang ancaman yang akan dihadapi AS di Pasifik Barat ini. Lain halnya dengan situasi yang dihadapi di Eropa di mana jelas bisa dihitung kekuatan NATO, termasuk kekuatan atau "deployment" AS, yang diperlukan untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan krisis. Karena itu berapa jumlah kesatuan angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara dan marinir yang diperlukan di Asia Pasifik untuk menghadapi krisis-krisis yang potensiil masih merupakan suatu perdebatan.

Seperti dikatakan di atas, karena strategi "forward defense" AS, maka kehadirannya di Pasifik Barat termasuk Asia Tenggara dianggap penting. Untuk ini pada umumnya dianggap bahwa pangkalan angkatan laut di Subic Bay adalah penting dan vital, justru karena skenario konflik dan konfrontasi yang akan datang sangat tidak menentu, misalnya apa yang akan terjadi dalam masa sepuluh tahun mendatang sehubungan dengan pertentangan antara Uni Soviet dengan RRC?; apa yang akan terjadi di RRC sendiri setelah pergolakan perebutan pengaruh dan kekuasaan di sana selesai ?; bagaimana perkembangan Jepang di masa yang akan datang dalam bidang persenjataan?; dan apa yang dikehendaki oleh Vietnam di masa tersebut?; apakah perdamaian di Asia Tenggara yang diinginkan karena mereka akan mengutamakan pembangunan dalam negerinya atau akan meningkatkan usaha-usahanya untuk membantu kekuatan komunis di sana ?

Dalam rangka ini bisa diduga bahwa kehadiran AS di kawasan ini terutama akan berupa kekuatan laut dan udara, sehingga kekuatan darat — kecuali di Korea Selatan, Jepang dan Okinawa — tidak akan dipergunakan lagi. Yang masih pelik seperti diuraikan di atas adalah masalah kehadiran angkatan darat AS di Korea Selatan, baik karena adanya tekanan-tekanan domestik yang dihadapi oleh Presiden Carter sehubungan dengan soal "human rights" maupun karena kegunaan kehadiran angkatan darat itu masih diperdebatkan di AS.

Karena alasan-alasan yang sama, dipertahankannya angkatan darat AS di Korea Selatan adalah untuk bisa mengimbangi kehadiran kekuatan-kekuatan besar lainnya, khususnya Uni Soviet dan RRC; maka negara-negara Asia Tenggara tetap menghendaki kehadiran AS di bidang keamanan di Asia Tenggara. Untuk maksud tersebut negara-negara itu beranggapan bahwa pangkalan angkatan laut di Subic Bay adalah vital karena di Asia Pasifik tidak ada pangkalan angkatan laut yang lain yang sebanding dengan pangkalan laut di Subic Bay itu. Bahkan kalau pun dananya tersedia, tempatnya akan terlalu jauh dari Asia Tenggara dan waktu membuatnya akan terlalu lama. Di samping itu ongkos-ongkos buruh di Subic Bay kurang dari 20% dibandingkan dengan ongkos buruh di AS. Soalnya adalah bagaimana kehadiran AS tersebut bisa disatukan dengan tujuan dari negara-negara anggota ASEAN termasuk Pilipina untuk mempersiapkan Asia Tenggara sebagai suatu kawasan damai, bebas dan netral. Dalam rangka itulah dilihat usaha-usaha Pilipina dan AS untuk merundingkan kembali syarat-syarat maupun kedaulatan atas pangkalan tersebut.

Lain pula rupanya kegunaan Clark Field, yang dahulu terutama dipakai untuk mengamankan pangkalan Subic Bay dan untuk beroperasi di daratan Asia. Yang diharapkan oleh negara-negara Asia Tenggara sehubungan dengan Subic Bay ialah agar sifatnya yang vital untuk keamanan kedua belah pihak itu sebagai pokok persoalan jangan sampai terlupakan karena retorika yang digunakan kedua belah pihak dalam menghadapi tekanan-tekanan domestik maupun dalam menjelaskan posisi masing-masing terhadap dunia luar.

Normalisasi hubungan AS dengan Vietnam yang sedang diusahakan pada saat ini mendapat dukungan dari negara-negara anggota ASEAN, dalam rangka usaha mengurangi ketergantungan Vietnam pada Uni Soviet dan membuat mereka bisa lebih fleksibel dalam menjalankan politik luar negerinya. Perubahan seperti ini akan bermanfaat pula untuk hubungan negara-negara anggota ASEAN dengan Vietnam di masa yang akan datang. Kekhawatiran negara-negara anggota ASEAN perihal akan dilimpahkannya bantuan dalam jumlah yang besar kepada Vietnam dalam bentuk pampasan perang adalah karena adanya kekhawatiran bahwa bantuan tersebut bisa menambah besar kekuatan ekonomi Vietnam dalam waktu yang singkat, sedangkan maksudnya belum jelas untuk masa yang akan datang. Kekhawatiran ini sudah diatasi dengan adanya penjelasan-penjelasan bahwa hal ini tidak akan mendapat dukungan dari opini publik AS maupun dari Kongres, di samping soal-soal pelaksanaan hak-hak asasi manusia di sana tentu akan menjadi hambatan pula. Yang mungkin paling penting untuk Asia Tenggara di bidang keamanan adalah sampai sejauh mana pemerintah maupun Kongres AS telah memikirkan untuk membantu kemampuan daya pertahanan negara-negara Asia Tenggara agar lambat laun bisa berdikari dalam bidang pertahanan keamanan.

Pada umumnya persepsi ancaman negara-negara Asia Tenggara meliputi subversi dan infiltrasi dari luar serta ketidak-stabilan dari dalam yang terutama harus diatasi dengan pembangunan suatu ketahanan nasional yang meliputi pembangunan ekonomi, sosial, politik, budaya, ideologi dan kepribadian nasional. Tetapi hal ini secara terbatas juga mempunyai segi-segi pertahanan keamanan. Karena itu bantuan AS dalam bidang pertahanan keamanan masih tetap diperlukan, terutama dalam bentuk latihan dan FMS dengan syarat-syarat yang lebih lunak. Yang paling ideal tentu saja adalah kalau untuk menghadapi ancaman-ancaman di atas negara-negara anggota ASEAN, dimungkinkan membangun industri pertahanan keamanan mereka sendiri sehingga dalam jangka waktu 10-15 tahun mendatang mereka bisa berdikari dalam menghadapi ancaman-ancaman tersebut. Hal ini perlu menjadi perhatian AS sebagai salah satu sumber utama persenjataan di dunia, terutama karena apa yang benar-benar dibutuhkan oleh negara-negara anggota ASEAN

bukanlah alat-alat yang "sophisticated" atau mahal tetapi alat-alat yang efektif untuk tujuan-tujuan yang terbatas. Dalam rangka ini bantuan ekonomi, perdagangan, investasi dan pengalihan teknologi tentu merupakan unsur-unsur bantuan yang terpenting untuk Asia Tenggara dalam rangka membangun ketahanan nasional dan ketahanan regional tersebut.

Dapat dimengerti pula keinginan yang mendalam dari Presiden Carter untuk memasukkan unsur hak-hak asasi sebagai moralitas bangsanya ke dalam politik luar negeri AS. Mungkin yang diharapkan oleh negara-negara Asia Tenggara dalam rangka ini ialah agar di samping penegasan secara umum tentang hak-hak asasi manusia itu, diambil tindakan-tindakan yang memperhatikan budaya dan situasi yang berbeda-beda di tiap-tiap negara yang sedang berkembang yang menghadapi persoalan-persoalan hak asasi. Diharapkan pula agar perhatian diberikan sehubungan dengan tuntutan pelaksanaan moralitas baru AS itu terhadap negara-negara komunis secara konsekwen pula, usaha-usaha untuk melaksanakannya di dalam negeri AS sendiri, dan yang terpenting adalah memperhatikan nasib negara-negara termiskin di dunia. Perhatian ini harus diberikan terutama dengan memperlihatkan pengertian dan kesediaan untuk membantu mereka lebih daripada yang sudah-sudah, baik secara bilateral maupun secara multilateral melalui berbagai badan internasional dan di dalam forum-forum internasional seperti UNCTAD, CIEC, PBB, GATT, dan lain-lain. Dengan tindakan-tindakan demikian keinginan tersebut tidak hanya akan bersifat retorik ataupun sefihak saja serta tidak mengandung suatu "moral arrogance" atau "double standard" yang biasanya tidak bisa diterima oleh negara yang sedang berkembang. Begitu pula sikap mass media Barat diharapkan bisa seimbang, bukan hanya memberitakan hal-hal yang jelek saja tetapi juga bisa memahami dan menghargai keinginan dan kemauan politik yang baik dari para pemimpin Asia Tenggara serta usaha-usaha mereka untuk secara sungguh-sungguh menghadapi berbagai kesulitan serta tantangan.

Dengan demikian dari AS negara-negara anggota ASEAN tidak dapat mengharapakan terlalu banyak memperoleh perhatian. Politik luar negeri AS nampaknya akan lebih selektif dan

negara-negara anggota ASEAN tidak akan dianggap benar-benar penting dan vital bagi kepentingan nasional AS. Namun demikian patut dicatat pula bahwa perkembangan negara-negara anggota ASEAN selama sepuluh tahun ini cukup besar dan cukup memperlihatkan bahwa mereka mempunyai kepercayaan pada diri mereka sendiri, bahwa mereka mampu menangani masalah-masalah mereka sendiri secara memuaskan dan bahwa mereka memiliki politik luar negeri yang semakin bebas dan aktif, dan bila perlu mampu secara independen menghadapi kekuatan besar manapun bagi kepentingan mereka di kawasan Asia Tenggara. Semua ini membuka kemungkinan adanya hubungan yang lebih sehat antara AS dan negara-negara anggota ASEAN atas dasar pengakuan adanya hak dan kewajiban masing-masing. Hal ini juga sejalan dengan keinginan negara-negara anggota ASEAN untuk menghindarkan diri dari hubungan secara "superpower - client" yang hanya akan menghancurkan negara-negara anggota ASEAN sendiri. Rasa nasionalisme yang mendalam diperlihatkan oleh negara-negara anggota ASEAN dan hal ini akan mempermudah diterimanya hubungan seperti itu serta bahkan akan melahirkan dukungan rakyat negara-negara ASEAN untuk politik luar negeri mereka semua.

Dengan munculnya hubungan yang berlangsung secara lebih sehat, diharapkan agar AS bersedia melakukan peranan yang lebih aktif di bidang ekonomi di kawasan ini dan agar sektor swasta juga berlaku sebagai saluran utama untuk kegiatan-kegiatannya. Yang harus dipikirkan di sini adalah bagaimana kedua belah pihak dapat mengkoordinasikan keinginan-keinginan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan negara-negara anggota ASEAN dengan kepentingan-kepentingan yang sah dari sektor swasta AS. Anggota-anggota ASEAN menyadari kebutuhan mereka akan modal dan teknologi dari AS, tetapi mereka juga menghadapi tekanan-tekanan dari sekelompok dari dalam masyarakatnya untuk mengambil sikap yang lebih independen dalam usaha-usaha melaksanakan pembangunan. Meskipun di AS terdapat perbedaan tajam antara sektor swasta dan sektor pemerintah, dalam hubungan dengan negara-negara yang sedang berkembang haruslah diberikan suatu unsur kepastian tambahan sebagai sumbangan dari pemerintah AS dalam bentuk jaminan tambahan, sikap terbuka dan usul-usul atau anjuran

dan rekomendasi terhadap sektor swasta. Tentu saja diharapkan pula bahwa pemerintah AS tetap akan melanjutkan bantuan pembangunannya, meskipun hal ini terutama akan disalurkan melalui badan-badan multilateral dan internasional seperti IBRD dan ADB. Dilanjutkannya peranan keamanan meskipun secara selektif dan terbatas, juga diharapkan tetap dipertahankan oleh AS di Asia Tenggara. Meskipun diakui bahwa pertimbangan-pertimbangan ideologis, yakni anti-komunisme, tidak lagi menonjol seperti pada masa Perang Dingin, diharapkan agar AS bersedia pula untuk tetap memperhitungkannya dalam situasi-situasi konkrit yang dihadapinya.

5. Hubungan Negara-negara Anggota ASEAN dengan Negara-negara Indocina

Yang terpenting dalam hubungan ini adalah bagaimana hubungan antara negara-negara anggota ASEAN Vietnam. Laos mempunyai arti yang kecil kecuali dalam soal hubungan perbatasan dengan Muangthai; sedangkan Kamboja demikian tertutup sehingga apa yang akan dilakukan mereka pada masa mendatang masih belum jelas atau menjadi dugaan. Meskipun belum lama ini Ieng Sary mengunjungi Kuala Lumpur, masih tetap jadi pertanyaan sampai di mana mereka mau membuka hubungan riil dengan dunia luar, termasuk dengan negara-negara anggota ASEAN. Hingga kini hanyalah hubungan antara Kamboja dengan RRC yang berarti, sedangkan dengan negara-negara yang lain belum ada tanda-tanda yang pasti.

Persoalan hubungan dengan Vietnam masih penuh dengan tanda tanya untuk negara-negara anggota ASEAN, karena masih belum jelas apakah Vietnam yang bersatu, setelah mengatasi persoalan-persoalan dalam negerinya seperti penyatuan bagian selatan yang untuk sementara masih sulit dan pembangunan ekonominya yang hancur karena peperangan yang lama, akan bersifat damai terhadap negara-negara tetangganya di Asia Tenggara atau tidak. Ketidak-pastian ini disebabkan karena Vietnam memiliki ideologi dan pimpinan yang keras dan bersatu, mempunyai persenjataan dan angkatan bersenjata yang

terbesar di Asia Tenggara, mempunyai disiplin bangsa yang tinggi dan mempunyai "rasa kemenangan" terhadap kekuatan utama dunia yaitu AS.

Harus diakui bahwa untuk sementara waktu kegiatan-kegiatan revolusioner terhadap tetangga-tetangganya di Asia Tenggara adalah terbatas, bahkan juga terhadap Muangthai yang paling rawan untuk dijadikan sasaran utama karena sejarah terlibatnya Muangthai dalam perang di Vietnam dan Laos. Bagaimanakah dan apakah bentuk dari sikap Vietnam di masa mendatang masih merupakan tanda tanya. Mungkin pula mereka akan terutama menekankan pembangunan dan penyatuan dalam negerinya. Di samping itu mereka akan mempunyai posisi yang cukup dominan di antara negara-negara Indocina, meskipun hubungan mereka dengan Kamboja terutama amat bergantung pada RRC dan dalam sejarahnya Kamboja tidak pernah terlalu senang pada dominasi Vietnam.

Begitu pula kekuatan ekonomi Vietnam adalah terbatas untuk bisa melakukan gangguan-gangguan terhadap negara tetangganya secara besar-besaran ataupun untuk jangka waktu yang lama. Tambahan lagi mereka bersifat sangat nasionalistis sehingga menolak dominasi RRC ataupun Uni Soviet. Maka itu mungkin pula mereka akan bisa hidup berdampingan secara damai dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya yang beraspirasi nasionalis dan karena itu juga menolak supremasi salah satu kekuatan besar di kawasan Asia Tenggara.

Kalaupun mereka mau membantu kekuatan-kekuatan subversi di lain-lain negara Asia Tenggara dewasa ini, harus diperhatikan bahwa semua partai komunis di kawasan Asia Tenggara masih berpaling pada Peking dan bukan pada Hanoi. Jadi efek bantuan Vietnam tersebut akan terbatas pula. Karena itulah maka negara-negara ASEAN, kecuali Indonesia yang sejak semula mempunyai hubungan dagang dengannya, segera mengadakan hubungan resmi dengan Vietnam agar dengan demikian Vietnam bisa dipengaruhi untuk menempuh cara-cara dan jalan damai, bebas dan netral di kawasan Asia Tenggara. Usaha-usaha kerjasama di bidang ekonomi pun dengan kunjungan Wakil Menteri Luar Negeri Pham Hien ke negara-negara anggo-

ta ASEAN telah dirintis. Hanya saja ASEAN sebagai suatu kerjasama regional belum bisa diterima oleh mereka karena mereka masih menganggapnya sebagai suatu ciptaan AS untuk menggantikan SEATO.

Karena itu persoalan apakah Vietnam ataupun negara-negara Indocina lainnya akan bisa menjadi anggota ASEAN atau tidak masih menjadi pembicaraan di antara anggota-anggota ASEAN. Ada yang berpendapat bahwa sebaiknya mereka diundang ikut menjadi anggota; ada pula yang berpendapat bahwa sebaiknya persoalan keanggotaan mereka ditunda dulu karena masih diperlukan waktu untuk menjadikan ASEAN suatu kerjasama yang kuat, sedangkan sistem ideologi, sosial-politik maupun ekonomi mereka demikian berbeda sehingga untuk sementara belum bisa ditampung oleh ASEAN. Di lain pihak mereka pun tidak menunjukkan hasrat apapun untuk mengakui ASEAN, apalagi untuk menjadi anggotanya dalam waktu dekat ini. Diperkirakan proses ke arah tersebut masih memakan waktu dan waktu tersebut hendaknya bisa dipergunakan oleh negara-negara anggota ASEAN untuk benar-benar membangun ASEAN. Kemungkinan di masa mendatang malahan akan timbul dua kelompok kerjasama, yang tidak mustahil bisa bekerjasama demi pembangunan, kestabilan dan keamanan di Asia Tenggara, yaitu kelompok ASEAN di satu pihak dan kelompok Indocina di lain pihak.

Kesemuanya ini tidak berarti bahwa kewaspadaan negara-negara anggota ASEAN harus dikurangi. Justru ketidak-pastian maksud Vietnam di masa yang akan datang sebagai kekuatan militer yang terbesar di Asia Tenggara harus benar-benar diperhitungkan oleh negara-negara anggota ASEAN. Di samping potensi militernya yang memang perlu diperhatikan, maka daya tarik Vietnam pun harus diperhitungkan pula sebagai suatu model bernegara dan model pembangunan yang telah menang perang melawan kekuatan terbesar seperti AS dan mungkin pula akan memperlihatkan daya pembangunan yang cepat dan besar di bawah suatu pimpinan dan semangat revolusioner serta disiplin bangsa Vietnam yang di masa lalu telah menunjukkan rasa pengorbanan yang besar. Hal ini pasti akan menjadi daya tarik sebagai suatu model pembangunan bagi rakyat Asia Tenggara,

yaitu suatu model yang berdasarkan Marxisme-Leninisme, yang menurut beberapa pengamat mungkin lebih berhasil daripada model-model lainnya. Oleh sebab itu dirasakan akhir-akhir ini adanya urgensi pada negara-negara anggota ASEAN untuk segera menjadikan ASEAN sebagai suatu kenyataan bagi rakyatnya, yaitu demi mempercepat proses pembangunan di segala bidang kehidupan rakyatnya untuk bisa mengimbangi daya tarik dari Vietnam. Dengan demikian dapatlah dimengerti kekhawatiran negara-negara anggota ASEAN kalau kepada Vietnam diberikan bantuan ekonomi secara besar-besaran.

6. Kerjasama ASEAN

Meskipun ASEAN dibentuk untuk suatu kerjasama regional di bidang ekonomi, kebudayaan dan ilmu pengetahuan, desakan-desakan dan situasi yang menciptakan ASEAN justru adalah pertimbangan pertahanan dan keamanan, yaitu dalam rangkaantisipasi dan kekhawatiran akan apa yang akan terjadi dalam perang di Indocina. Karena itu segi-segi keamanan dan pertahanan tersebut tidak bisa diabaikan begitu saja oleh negara-negara anggota ASEAN. Dalam hal ini segera harus dibantah tuduhan-tuduhan bahwa ada keinginan di antara para anggota ASEAN untuk menciptakan suatu pakta militer atau kerjasama militer yang multilateral atau regional. Ada dua hal yang menyebabkan mereka menolak ide pakta militer. Pertama, mereka tidak merasakan adanya ancaman dari luar, tetapi terutama dari dalam yang bisa dibantu dari luar dalam bentuk subversi dan infiltrasi, sehingga yang bisa menghadapi ancaman tersebut adalah pemerintah dan bangsa yang bersangkutan seperti yang terbukti di mana-mana dan terakhir di Vietnam dan karenanya suatu pakta militer tidak akan efektif menghadapinya. Kedua, suatu pakta militer hanya akan menimbulkan kekhawatiran yang tidak perlu pada Vietnam dan akan menciptakan kesan bahwa seakan-akan ASEAN merupakan suatu usaha untuk menghadapi mereka secara militer. Konsep ini berarti bahwa kalau pembangunan nasional yang menyeluruh dari tiap-tiap anggota bisa tercapai dan bisa mengatasi ancaman-ancaman dari dalam tersebut, maka dengan sendirinya tercipta pula suatu ketahanan

regional seperti suatu mata rantai yang tiap-tiap matanya kuat sehingga berakibat kuatnya seluruh rantainya.

Dalam rangka pelaksanaan ide inilah maka kerjasama *bilateral* di pelbagai bidang pertahanan-keamanan antara anggota-anggota ASEAN dijalankan, terutama dalam bentuk tukar-menukar pengalaman dalam menghadapi ancaman-ancaman dalam negeri yang dalam banyak hal memiliki persamaan-persamaannya pula. Usaha-usaha kerjasama *bilateral* tersebut karenanya terutama berupa tukar-menukar informasi dan intelijens, latihan-latihan bersama baik di laut, udara atau darat, dalam patroli atau operasi bersama di perbatasan, tukar-menukar pendidikan perwira dan usaha-usaha untuk uniformasi dalam logistik dan persenjataan tertentu agar bisa lebih efisien dan murah.

Dalam masa sepuluh tahun berdirinya ASEAN maka hasil-hasil yang dicapainya terutama justru berarti di dalam bidang politik, yaitu pertama-tama, kecurigaan maupun persoalan-persoalan intra-regional yang sebelumnya justru menimbulkan kerawanan politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara antara anggota-anggota ASEAN bisa diatasi. Antara lain adalah persoalan perbatasan antara Malaysia dan Muangthai, persoalan pertikaian antara Singapura dan Malaysia karena sejarah perkembangan Malaysia dan keluarnya Singapura dari federasi tersebut, persoalan antara Singapura dan Indonesia karena terjadinya penyelundupan-penyelundupan, persoalan Sabah antara Malaysia dan Pilipina yang meskipun belum sampai diselesaikan tidak lagi menjadi suatu konfrontasi yang bisa melemahkan kerjasama di bidang-bidang lain di antara anggota-anggota ASEAN, persoalan perbatasan antara Malaysia dan Indonesia yang dulu sampai menimbulkan konfrontasi sekarang menjadi salah satu contoh kerjasama perbatasan yang patut ditiru di antara anggota-anggota ASEAN, persoalan Wawasan Nusantara dari Indonesia yang pada prinsipnya telah diselesaikan dengan Malaysia, begitu pula persoalan Selat Malaka yang telah menjadi persetujuan antara Singapura, Malaysia dan Indonesia. Kesemuanya ini tidak berarti bahwa tidak ada lagi persoalan intra-regional antar anggota ASEAN, tetapi telah ditunjukkan bahwa cara-cara penyelesaian seperti yang sekarang telah dituangkan dalam perjanjian untuk menyelesaikan konflik-kon-

flik intra-regional dan telah ditandatangani di KTT Bali pada tahun 1976 sudah berjalan dan telah menghasilkan penyelesaian antar anggota melalui jalan-jalan damai, musyawarah dan konsensus. Kedua, telah dicapai pula suatu mekanisme antar anggota ASEAN untuk sinkronisasi dan koordinasi kebijaksanaan bersama ataupun masing-masing terhadap persoalan ekstern yang dihadapi, seperti persoalan hubungan diplomatik dengan RRC, sikap di berbagai forum internasional dalam soal penyelesaian perang Vietnam, soal dialog Utara-Selatan di Paris, soal hubungan dengan Jepang, MEE, AS, Australia, dan New Zealand. Ketiga, dan mungkin hasil yang terpenting, yang telah dicapai dalam kerjasama politik, ialah adanya saling pengertian, saling menahan diri, terhadap sikap dan kebijaksanaan maupun persoalan anggota-anggota lainnya, disertai keinginan dan kemauan politik serta "sense of urgency" untuk lebih memajukan ASEAN. Karena itu perbedaan-perbedaan pendapat dalam tahap-tahap pelaksanaan reduksi tarif perdagangan intra-ASEAN, penyelesaian masalah Pilipina Selatan, soal integrasi Timor Timur ke dalam Indonesia, soal Sabah, soal Selat Malaka dan soal Wawasan Nusantara dari Indonesia tidak sampai menimbulkan ketegangan-ketegangan baru, tetapi malahan dapat diselesaikan karena adanya saling pengertian dan adanya kemauan tersebut. Keempat, ide kerjasama intra-regional makin lama makin dimasyarakatkan sehingga tidak hanya meliputi kerjasama antar pemerintah saja, tetapi lambat laun juga telah menjadi kenyataan antara para wiraswasta, pemuda dan mahasiswa, wartawan, wanita, buruh, dan cendekiawan di negara-negara anggota ASEAN.

Rupanya Asia Tenggara pada masa depan yang tidak begitu jauh tidak akan didominasi oleh kekuatan-kekuatan besar baik karena kurang keinginan atau karena kurang kemampuan seperti di atas telah diuraikan. Maka itu di kawasan Asia Tenggara akan terdapat keseimbangan kekuatan secara minimal. Dalam kerangka ini anggota-anggota ASEAN telah melontarkan konsep Asia Tenggara sebagai suatu "zone of peace, freedom and neutrality" di mana kepribadian nasional, kemerdekaan dan keutuhan atau kedaulatan masing-masing negara anggota dapat dipelihara dan dipertahankan. Konsep ini bermaksud untuk mencapai kemajuan dan perkembangan serta kesejahteraan nasional masing-ma-

sing dan juga untuk meningkatkan kerjasama dan solidaritas regional, sesuai dengan cita-cita dan aspirasi rakyat di wilayah itu dan sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam PBB tentang kebebasan dari setiap bentuk atau cara campurtangan oleh kekuatan-kekuatan luar. Pada tingkat pertama perkembangannya, konsep ini bertujuan untuk membentuk ketahanan nasional dan ketahanan regional di antara negara-negara anggota ASEAN. Pembentukan ketahanan ini bertujuan akhir agar pembangunan nasional secara lengkap dapat terealisasi dan konsep itu juga dapat diterima, baik secara eksplisit dalam bentuk kebijaksanaan resmi dan formil ataupun secara implisit dalam bentuk tindakan-tindakan yang mereka laksanakan, oleh negara-negara besar. Harapan-harapan agar konsep ini lambat laun menjadi kenyataan didasarkan atas penilaian dan perkiraan tentang terdapatnya faktor-faktor ekstern yang memungkinkan, dan juga karena faktor-faktor domestik dan intra-ASEAN menunjukkan perkembangan yang mengembirakan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan politik-keamanan di atas dapatlah diambil kesimpulan bahwa negara-negara anggota ASEAN dewasa ini semakin menyadari pentingnya kerjasama regional. Dalam menghadapi situasi internasional yang kritis seperti ketidak-pastian politik dan ekonomi, mereka akan menempatkan tekanan yang lebih besar pada kerjasama regional yang konkrit di bidang-bidang politik, ekonomi dan kebudayaan. Untuk inilah lembaga-lembaga dan organisasi ASEAN akan ditingkatkan dan diperkuat dalam hal tempat, kedudukan, dan fungsi Kepala Negara atau Kepala Pemerintah, Menteri-menteri Ekonomi dan Menteri-menteri di bidang-bidang lain, serta Sekretariat Jenderal ASEAN. Hal ini dilakukan pada KTT II yang berlangsung di Kuala Lumpur dalam bulan Agustus (1977). Kerjasama ekonomi juga akan meningkat dalam tahun-tahun mendatang dalam bentuk proyek-proyek ekonomi bersama dan juga dalam bentuk kebijaksanaan-kebijaksanaan terhadap negara-negara lain. Ini berarti bahwa peranan ASEAN, kebijaksanaan bersama dan infrastruktur keorganisasiannya yang diperlukan untuk melakukan hubungan dengan partner-partner ekonomi seperti Jepang, AS, MEE, Australia, Kanada, dan New Zealand, akan ditingkatkan.

7. Soal-soal lain yang menyangkut segi-segi politik-keamanan di Asia Tenggara

Pertama-tama adalah persoalan hubungan negara-negara Asia Tenggara di satu pihak dengan negara-negara Australia, New Zealand dan Papua Nugini di lain pihak. Hubungan tersebut meskipun tidak vital cukup penting sifatnya, karena apa yang akan terjadi di Pasifik Selatan akan menyangkut pula kepentingan Asia Tenggara, sedangkan ketiga negara tersebut adalah tiga negara terbesar yang terutama menjaga kestabilan dan keamanan di kawasan tersebut. Di samping itu, dalam rangka pembentukan kerjasama ekonomi regional di Pacific Basin, peranan Australia, New Zealand dan Papua Nugini akan penting pula di masa yang akan datang. Khususnya peranan Australia, sebagai satu negara produsen bahan-bahan mentah yang utama, akan penting artinya dalam rangka hubungan dialog Utara-Selatan. Hanya harus disadari bahwa antara negara-negara Asia Tenggara dengan ketiga negara Pasifik Selatan itu terdapat perbedaan-perbedaan kebudayaan dan nilai-nilai, sehingga diperlukan jembatan-jembatan yang dipersiapkan secara khusus di segala lapisan kepemimpinan masyarakat, agar tidak sampai menimbulkan salah pengertian atau kesalahan-kesalahan di masa-masa yang akan datang dalam hubungan tersebut.

Dalam pada itu hasrat dari ketiga negara untuk mempunyai hubungan erat dengan Asia Tenggara pada umumnya diterima baik dari pihak negara-negara Asia Tenggara, meskipun masih dicari bentuk-bentuk kerjasama yang memadai untuk pelaksanaannya, terutama di bidang ekonomi. Dalam rangka ini pula PM Fraser dari Australia dan PM Muldoon dari New Zealand diundang ke Kuala Lumpur dalam rangka KTT II ASEAN untuk menjajagi dan merintis kerjasama yang mungkin dilaksanakan.

Kedua, kerjasama dengan Kanada yang merupakan negara produsen bahan-bahan mentah yang besar dan mempunyai minat untuk memperluas hubungannya ke Pasifik Barat juga akan membawa kebaikan dan kemajuan bagi kerjasama regional yang luas di Pacific Basin. Terutama pula karena Kanada sebagai negara produsen bahan-bahan mentah mempunyai pula

berbagai kepentingan yang paralel dengan negara-negara Asia Tenggara.

Ketiga, hubungan dengan negara-negara Amerika Latin yang berbatasan pula dengan Samudera Pasifik (seperti Meksiko, Peru, dan Chili) masih ada dalam taraf permulaan dan terjadi dalam forum-forum internasional seperti PBB dan dialog Utara-Selatan. Meskipun mulai ada minat dari pihak mereka untuk lebih meningkatkan kerjasama tersebut, hal ini diperkirakan masih akan makan waktu yang agak lama karena orientasi mereka pada umumnya ke AS dan Eropa Barat.

Keempat, penting pula rasanya untuk disinggung hubungan Asia Tenggara dengan India dan Iran. Terutama di bawah PM Indira Gandhi, India berusaha untuk mengembalikan kepemimpinannya di antara negara-negara Asia dan negara-negara non-blok dan meningkatkan hubungannya dengan negara-negara Asia Tenggara. Tetapi karena keterbatasan kemampuan berhubung tekanan-tekanan dalam negerinya maka hasilnya masih minim. Kemajuan yang minim ini antara lain adalah karena India dianggap terlalu dekat dengan Uni Soviet, meskipun perhatian terhadap mereka agak meningkat sedikit setelah India mampu membuat senjata nuklir. Sebelum dan setelah pemilihan umum pada bulan Maret 1977 di India terdapat tanda-tanda bahwa politik luar negeri India akan menjadi lebih seimbang sehubungan dengan tiga kekuatan besar, yakni Uni Soviet, RRC dan AS. Maka itu, di masa depan dapat diharapkan bahwa hubungan yang lebih erat antara India dengan ASEAN dapat terjadi. Dalam pada itu Iran telah menjadi kekuatan militer terbesar di Teluk Persi terutama dalam rangka menjaga kestabilan di bagian kawasan tersebut dan dalam rangka menjaga kestabilan perdamaian di Samudera Indonesia. Pengaruh langsung Iran terhadap Asia Tenggara dianggap kurang mempunyai arti, sedangkan Pakistan dan Bangladesh masih terlalu banyak mempunyai persoalan domestik sehingga dalam bidang luar negeri belum mampu berperan secara berarti, juga di Asia Tenggara. Di masa depan Samudera Indonesia akan menjadi samudera yang paling penting karena dekatnya pada sumber-sumber minyak bumi dan bahan-bahan mentah, lokasi strategisnya untuk pelayaran dan jumlah penduduk yang banyak di

sekelilingnya. Maka itu, Samudera Indonesia harus dijauhkan dari segala kemungkinan adanya ancaman. Negara-negara Asia Tenggara yang membatasi Samudera Indonesia berpendapat bahwa Samudera Indonesia itu hendaknya dijadikan suatu kawasan yang bebas dari persaingan baik dalam persenjataan nuklir maupun dalam persenjataan konvensional. Secara realistis yang dimaksudkan adalah tetap dipertahankannya keseimbangan persenjataan pada tingkat yang paling rendah.

III. BEBERAPA KESIMPULAN

1. Dari uraian di atas jelas bahwa untuk lima sampai sepuluh tahun yang akan datang negara-negara Asia Tenggara, termasuk negara-negara Indocina, menghadapi suatu lingkungan dan situasi politik-keamanan yang sangat menguntungkan mereka karena tidak adanya dominasi ataupun supremasi dari salah satu kekuatan besar di luar mereka yang bisa ataupun mau membawa ketidak-stabilan ataupun ketidak-amanan yang baru.
2. Karena itu pula terbuka lebar kesempatan bagi mereka untuk membangun dirinya masing-masing atau bersama-sama, baik di bidang ekonomi, maupun di bidang lainnya seperti sosial, politik dan kepribadiannya. Justru dengan tidak adanya dominasi tersebut, maka campurtangan, tekanan, ataupun hubungan "superpower—client" menjadi berkurang, sehingga mereka bisa menciptakan suatu masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai budaya dan kepribadiannya sendiri. Hal ini berarti pula bahwa hubungan dengan negara-negara besar lainnya cukup berdasarkan persamaan hak dan tanpa campur-tangan dalam soal intern negara-negara tersebut masing-masing. Hal ini tentu tidak berarti bahwa sama sekali tidak akan ada gangguan-gangguan lagi terutama yang bersifat atau berbentuk subversi dan infiltrasi. Namun demikian hal itu berarti bahwa faktor-faktor ekstern merupakan faktor-faktor yang bisa diatasi dan bahwa adalah faktor-faktor intern seperti kesatuan kepemimpinan dan kesatuan bangsa, kemauan dan kemampuan untuk membangun, meratakan pembangunan tersebut dan

adanya daya penyesuaian dengan derap langkah perkembangan internasional di segala bidang — atau dengan kata singkat, ketahanan nasional di segala bidang yang terutama akan menentukan nasib bangsa-bangsa Asia Tenggara tersebut.

3. Dengan demikian suatu Asia Tenggara yang damai, bebas dan netral sesuai dengan kepribadian masing-masing bukanlah suatu masa depan yang mustahil dapat dicapai, kalau persoalan-persoalan dalam negeri bisa diselesaikan secara baik.
4. Dari uraian di atas ternyata pula betapa pentingnya pembangunan ekonomi bagi tercapainya kestabilan dan betapa erat hubungannya dengan soal-soal politik dan keamanan hingga akan menjadi fokus utama dalam pembangunan Asia Tenggara.
5. Di bidang ini pula terlihat kerjasama internasional yang penting di masa yang akan datang di mana peranan AS, Jepang dan Eropa Barat akan penting sekali dalam membantu tercapainya kestabilan dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara ini karena modal dan teknologi justru kebanyakan bisa diharapkan dari mereka.
6. Soalnya ialah bagaimana menyatukan kepentingan mereka dengan kepentingan negara-negara Asia Tenggara yang sedang membangun, bagaimana cara-cara dan mekanismenya untuk dapat mewujudkan kerjasama ini. Di dalam hal ini, perhatian forum-forum internasional dan bilateral harus dirangsang dan diarahkan agar terwujud pengertian dan kesediaan negara-negara industri sehubungan dengan kebutuhan dan kepentingan negara-negara Asia Tenggara.
7. Dalam pada itu sudah dapat dilihat adanya kemauan yang kuat di antara negara-negara Asia Tenggara untuk membangun dan ada pula usaha-usaha yang sungguh-sungguh untuk mewujudkannya meskipun masih banyak kekurangan dan kelemahan yang tetap diakui pula. Hasil-hasil yang telah dicapai untuk negara-negara anggota ASEAN yang

mempunyai perkembangan GNP rata-rata lebih dari 5% setiap tahunnya menunjukkan adanya kesungguhan dan juga kemampuan untuk itu.

8. Negara-negara Asia Tenggara pada umumnya pernah mempunyai kebudayaan-kebudayaan yang tinggi di masa lampau; dan karena desakan-desakan kolonialisme mereka menjadi bersifat nasionalis hal mana tidak perlu diartikan secara negatif, tetapi justru bisa memperkuat dorongan untuk maju dan berkembang dalam dunia yang makin interdependen pula, karena sejajar dengan semangat nasionalisme tersebut timbul pula kesadaran akan betapa pentingnya kerjasama regional dan internasional.